Seluruh Calon Kepala Daerah Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Selama Kampanye

Senin, 28 September 2020

Seluruh calon kepala daerah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan perlunya komitmen penuh untuk mendisiplinkan protokol kesehatan selama kampanye guna mencegah timbulnya klaster Pilkada. KPU telah menetapkan sanksi administratif bagi calon yang melanggar aturan kampanye di masa pandemi.

Calon kepala daerah dianjurkan memanfaatkan ruang virtual untuk berkampanye dan bertemu konstituen, meminimalisir kerumunan massa dan menekan laju penyebaran Covid-19. Himbauan ini disampaikan Khofifah mengingat dimulainya masa kampanye pada 26 September 2020 dan berakhir pada 5 Desember 2020.

Di Jawa Timur sendiri, 19 kabupaten/kota menyelenggarakan Pilkada serentak dengan total jumlah pemilih mencapai 19,9 juta. Gubernur Khofifah menekankan bahwa tidak ada pilihan lain selain menaati protokol kesehatan selama masa kampanye. Aturan ini berlaku untuk semua calon kepala daerah, partai politik, tokoh masyarakat, pendukung, simpatisan, dan pemilih.

Pilkada Serentak 2020 melibatkan 270 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Penting bagi semua pihak untuk bertanggung jawab dalam mematuhi protokol kesehatan selama masa kampanye agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing.

Gubernur Khofifah berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat selama proses Pilkada. Kampanye Pilkada harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak memicu penyebaran virus dan tetap menjaga situasi kondusif di tengah pandemi Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.